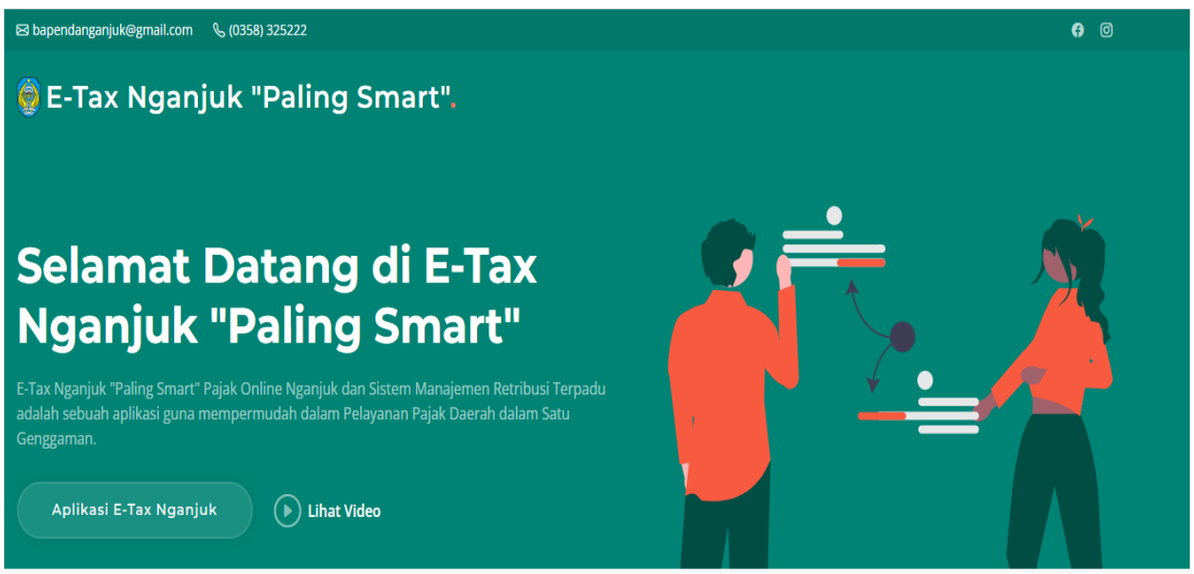
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025



MEMBAYAR PAJAK NON TUNAI CEPAT, MUDAH,MURAH,AMAN,HANDAL

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Rancangan awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 126 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur penunjang sebagai pelaksana dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini mengemban misi ke-4 Rencana Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur”.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan didalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 2024 – 2026 seperti Tabel berikut :

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 -2026 dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026

Misi ke-4 : Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur

Tujuan		Sasaran	
RPD Tahun 2024 - 2026	Renstra Bapenda Tahun 2024 - 2026	RPD Tahun 2024 - 2026	Renstra Bapenda Tahun 2024 - 2026
"Nganjuk Akuntabel". Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah

Dalam mewujudkan Tujuan, sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2025.

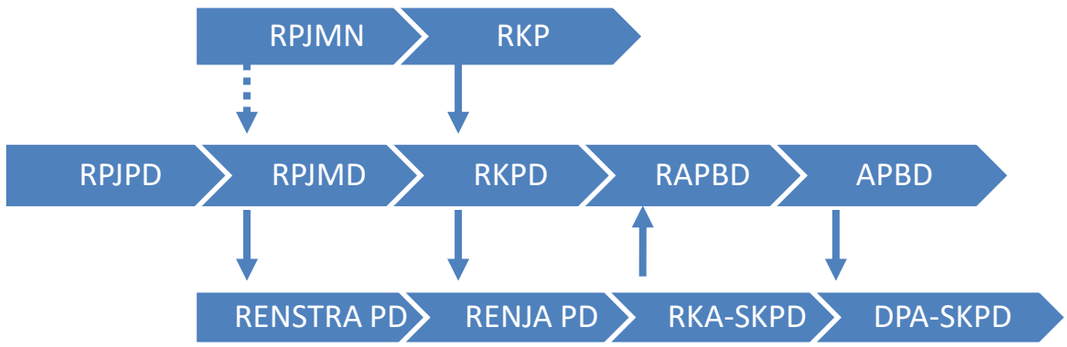
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dan Renstra Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026 yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:

- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

1.1. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.2.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-2 (ke-kedua) periode tahun 2025; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional Dalam pelaksanaan kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menindaklanjuti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah telah tersusun :

1. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah tanggal 28 Desember 2023;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2024 tentang Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan retribusi Perijinan tetentu tanggal 19 Pebruari 2024;
3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah tanggal 23 April 2024.

Sedangkan terkait Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan Digitalisasi daerah, Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan digitalisasi Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota serta tata cara implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah telah disusun :

- Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/92/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 tahun 2023 tentang Implementasi Elektronifikasi transaksi Pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/95/K/411.013/2022 tentang Peta jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk;
- Instruksi Bupati Nganjuk Nomor 88//870/411.403/2022 tebtabg Percepatan digitalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk.

Hasil dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada semester 2 Tahun 2023 memperoleh tahap DIGITAL dengan Score 99,3% sebagai bukti berikut :

Skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 202

Pemerintah Daerah	Indeks ETPD			
	SM-I 2023		SM-II 2023	
	Score	Tahap	*Score*	Tahap
Provinsi Jawa Timur	90,8%	Digital	96,5%	Digital
Kota Mojokerto	96,6%	Digital	90,8%	Digital
Kota Surabaya	96,5%	Digital	96,5%	Digital
Kabupaten Bangkalan	92,3%	Digital	94,3%	Digital
Kabupaten Bojonegoro	94,3%	Digital	96,0%	Digital
Kabupaten Gresik	96,5%	Digital	94,8%	Digital
Kabupaten Jombang	91,5%	Digital	93,3%	Digital
Kabupaten Lamongan	96,8%	Digital	91,5%	Digital
Kabupaten Mojokerto	99,3%	Digital	99,3%	Digital
Kabupaten Pamekasan	93,3%	Digital	94,3%	Digital
Kabupaten Sampang	96,0%	Digital	94,3%	Digital
Kabupaten Sidoarjo	97,5%	Digital	98,3%	Digital
Kabupaten Sumenep	86,8%	Digital	92,0%	Digital
Kabupaten Tuban	95,8%	Digital	94,0%	Digital
Kabupaten Banyuwangi	95,4%	Digital	97,5%	Digital
Kabupaten Bondowoso	96,4%	Digital	92,9%	Digital
Kabupaten Jember	96,4%	Digital	98,5%	Digital
Kabupaten Lumajang	93,7%	Digital	90,0%	Digital
Kabupaten Situbondo	89,4%	Digital	91,2%	Digital
Kota Blitar	95,0%	Digital	100,0%	Digital
Kota Kediri	81,8%	Digital	95,8%	Digital
Kota Madiun	95,1%	Digital	99,3%	Digital
Kabupaten Blitar	81,1%	Digital	97,5%	Digital
Kabupaten Kediri	82,8%	Digital	95,8%	Digital
Kabupaten Madiun	90,8%	Digital	95,0%	Digital
Kabupaten Magetan	80,5%	Digital	97,5%	Digital
Kabupaten Nganjuk	97,2%	Digital	99,3%	Digital
Kabupaten Ngawi	97,9%	Digital	100,0%	Digital
Kabupaten Pacitan	94,0%	Digital	87,2%	Digital
Kabupaten Ponorogo	86,3%	Digital	96,8%	Digital
Kabupaten Trenggalek	75,3%	Maju	91,5%	Digital
Kabupaten Tulungagung	81,0%	Digital	94,3%	Digital
Kota Batu	93,0%	Digital	94,8%	Digital
Kota Malang	88,7%	Digital	96,5%	Digital
Kota Pasuruan	98,5%	Digital	98,5%	Digital
Kota Probolinggo	88,4%	Digital	96,8%	Digital
Kabupaten Malang	86,0%	Digital	91,4%	Digital

Sedangkan pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

3.3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun-2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023					Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasai Target Renstra (%)
2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
KEUANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan pajak daerah	85	%	93.35	90	%	94	%	100,70	85	%	85.00	100%
	Nilai Sakip SKPD	A (90)								A		A	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selesai	13	dok	92	12	dok	16	Dokumen	133.33	6	Dokumen	114.00	8.77
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, yang selesai	6	dok	30	6	dok	8	Dokumen	133.33	7	Dokumen	45.00	7.50
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen re yang selesai	7	dok	62	6	dok	8	Dokumen	133.33	6	Dokumen	76.00	10.86
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang selesai	42	Dokumen	191	75	dok	41	Dokumen	54.67	91	Dokumen	323.00	7.69
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	23	dokumen	56	45	dok	44	Orang	97.78	45	Orang	145.00	6.30
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	Laporan	4	1	lap	1	Laporan	100.00	45	Laporan	50.00	50.00

		Jumlah laporan keuangan,bulanan,triwulan, semesteran Perangkat Daerah yang disusun	18	Laporan	131	29	lap	27	Laporan	93.10	1	Laporan	159.00	8.83
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	1	dok	4	1	dok	1	Laporan	100.00	15	Laporan	20.00	20.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	1	dok	4	1	dok	4	Dokumen	400.00	15	Dokumen	23.00	23.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% ASN yang hadir dan pulang tepat waktu	100	%	8	8	dok	9	Dokumen	112.50	8	Dokumen	25.00	0.25
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya	48	Orang	181	44	orang	43	Orang	97.73	44	Orang	268.00	5.58
	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	Dokumen	48	12	lap	3	Dokumen	25.00	12	Dokumen	63.00	5.25
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	44	Orang	99	44	org	63	Orang	143.18	63	Orang	225.00	5.11
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksnakan	12	Laporan	10	10	bk	9	Laporan	90.00	12	Laporan	31.00	2.58
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90	Paket							90		90.00	1.00
	Penyediaan Komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor				79	10	Paket	13	Paket	130.00			92.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				23	10	Paket	10	Paket	100.00			33.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik Kantor Bapenda	60	Paket	237	60	Paket	53	Paket	88.33	60	Paket	350.00	5.83
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	118,096	paket	446,749	101,000	paket	143,631	paket	142.21	118,096	paket	708,475.88	6.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1,120	Exl	4,497	1,120	Exl	810	Exl	72.32	1,120	Exl	6,427.00	5.74
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	48	12	Laporan	9	Laporan	75.00	12	Laporan	69.00	5.75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	48	12	Laporan	9	Laporan	75.00	12	Laporan	69.00	5.75
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	48	12	Dokumen	9	Dokumen	75.00	12	Dokumen	69.00	5.75
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4	Laporan	4	-	Laporan	-	laporan				4.00	1.00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	10	unit	126	20	unit	20	unit	100.00	11	unit	157.00	15.70
Pengadaan Kendaaan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaaan dinas operasional atau lapangan yg disediakan			1			0					1.00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			-			0				Unit	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	20	unit meja/kursi	22			0			50	Unit	72.00	3.60
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin kantor yang di adakan	10	unt	103	34	Unit	34	Unit	100.00	10	Unit	147.00	14.70
Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan			-			0					-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3	jasa	3	3	Jasa	3	Jasa	100.00	3	Jasa	9.00	3.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	48	12	Laporan	9	Laporan	75.00	12	Laporan	69.00	5.75
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	48	12	Laporan	9	Laporan	75.00	12	Laporan	69.00	5.75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	48	12	Laporan	9	Laporan	75.00	12	Laporan	69.00	5.75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang dipelihara	52	unit	236	52	unit	45	unit	86.54	52	unit	333.00	6.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	19	unit	19	19	unit	19	unit	100.00	19	unit	57.00	3.00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang dipelihara	10	unit	46	17	unit	0	unit	-	10	unit	56.00	5.60
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharat	22	unit	170	25	unit	25	unit	100.00	22	unit	217.00	9.86
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yangterpelihara	1	gedung	1	1	gedung	1	gedung	100.00	1	gedung	3.00	3.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosesntase Kenaikan PAD	8,50	%		8,5	%	(9,57)	%	(112,54)				
	Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu	667,000.00	WP							667,000.00	WP	667,000.00	100%

		Jumlah Wajib Pajak Baru	2,000.00	WP							2,000.00	WP	2,000.00	100%
		Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100.00	%							100.00	%	100.00	100%
		Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100.00	%							100.00	%	100.00	100%
Pengelolaan pendapatan Daerah		Prosesntase Kenaikan PAD	8,50	%		8,50	%	(9,57)	%	(112,54)				
		Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu	667,000.00	WP							667,000.00	WP	667,000.00	100%
		Jumlah Wajib Pajak Baru	2,000.00	WP							2,000.00	WP	2,000.00	100%
		Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100.00	%							100.00	%	100.00	100%
		Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100.00	%							100.00	%	100.00	100%
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Perencanaan pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan	3	Dokumen	10	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00	3	Dokumen	16.00	5.33
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	-	1		1	Dokumen	100.00	1	Dokumen	2.00	2.00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	26	2	Laporan	8	Laporan	400.00	12	Laporan	46.00	3.83
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25	Jenis	100	25	Jenis	25	Jenis	100.00	25	Unit	150.00	6.00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan	48	12	Laporan	12	Laporan	100.00	12	Laporan	72.00	6.00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	Laporan	9	2	Laporan	3	Laporan	150.00	2	Laporan	14.00	7.00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3,000	OP	17,604	6,250	OP	6254	OP	100.06	3,000	OP	26,858.00	8.95
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24	Dokumen	96	24	Dokumen	24	Dokumen	100.00	24	Dokumen	144.00	6.00

	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35,000	Layanan	37,684	35,000	Layanan	36050	Layanan	103.00	35,000	Layanan	108,734.00	3.11
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	48	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00	12	Dokumen	72.00	6.00
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	48	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00	12	Dokumen	72.00	6.00
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	39	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00	12	Dokumen	63.00	5.25
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dokumen	48	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00	12	Dokumen	72.00	6.00
	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	lap	-	3	lap	3	lap	100.00	12	Dokumen	15.00	1.25
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	laporan	-	4	laporan	4	laporan	100.00	12	laporan	16.00	1.33

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,70%	Sangat tinggi
Program Pengelolaan Pendapatan	(112,54)%	Sangat rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Lokasi sulit terjangkau dengan SDM yang terbatas	Target tidak Optimal	1. Kerja sama dengan Pihak ketiga
1. Belum semua Subyek Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak	Target tidak optimal	- Melaksanakan Pendataan secara terus menerus - Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak
2. Wajib pungut kuatir apabila ditambah pajak, konsumen tidak mau membeli lagi	Realisasi tidak optimal	- Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pungut - Melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat melalui Media sosiaal, pemasangan banner

3. Sistem Pengelolaan Pajak dan retribusi terganggu (virus, Hacker)	Penerimaan tertunda	Memasang alat untuk mengantisipasi virus, hacker
4. WP/WR tidak melaporkan pajak sesuai omset penjualan/penggelapan pajak	Realisasi tidak optimal	- Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak - Melaksanakan pengawasan
5. Kurangnya kuantitas & kualitas SDM	Target dan realisasi tidak optimal	Mengusulkan sdm untuk mengikuti Bintek Pemeriksa Pajak, Analis Pajak, Juru sita, Penagihan pajak
6. Masih adanya piutang pajak	Realisasi tidak optimal	1. Menyusun TIM Penyelesaian Piutang Pajak 2. Verifikasi data piutang 3. Penghapusan piutang
7. Pembayaran Pajak Tunai	Penerimaan ada yang dibawa oleh petugas pungut	Sosialisasi pembayaran non tunai kepada masyarakat, wajib pungut baik secara tatap muka, media social, banner
8. Belum optimalnya penerimaan Retribusi Daerah	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil
9. Belum optimalnya penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil
10. Belum optimalnya penerimaan Lain-lain PAD yang sah	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil

6.3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) Tahun atau Tahun 2018 s/d 2023 sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022			TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2,609,395,519,539.00	2,687,294,591,282.60	102.99	2,452,965,706,266.00	2,502,103,857,992.94	102.00	2,134,369,539,485.00	2,608,437,760,441.79	122.21
PENDAPATAN ASLI DAERAH	372,424,742,693.00	402,455,177,760.60	108.06	384,183,486,327.00	445,923,933,540.94	116.07	359,762,424,055.00	478,462,298,144.79	132.99
Pendapatan Pajak Daerah	136,875,250,000.00	149,424,800,824.00	109.17	122,305,000,000.00	135,071,942,647.00	110.44	88,489,600,000.00	122,126,175,036.00	138.01
Hasil Retribusi Daerah	29,260,340,224.00	29,386,629,455.58	100.43161	27,301,537,582.00	26,492,593,548.82	97.04	27,521,750,427.00	25,138,334,329.00	91.34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,425,444,869.00	4,425,444,868.86	99.999999997	4,099,258,628.00	4,099,258,627.94	100.00	3,741,455,500.00	4,040,422,262.00	107.99
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201,863,707,600.00	219,218,302,612.16	108.60	230,477,690,117.00	280,260,138,717.18	121.60	240,009,618,128.00	327,157,366,517.79	136.31
DANA PERIMBANGAN	-	-		-	-		-	-	
PENDAPATAN TRANSFER	2,183,092,087,144.00	2,234,991,486,508.00	102.38	1,910,407,441,736.00	1,906,670,928,426.00	99.80	1,676,718,635,430.00	2,020,931,609,297.00	120.53
Tranfer Pemerintah pusat	1,975,137,540,144.00	2,002,309,215,415.00	101.38	1,747,725,464,585.00	1,723,875,318,094.00	98.64	1,580,961,551,000.00	1,820,178,567,900.00	115.13
Tranfer Pemerintah Daerah	207,954,547,000.00	232,682,271,093.00	111.89	162,681,977,151.00	182,795,610,332.00	112.36	95,757,084,430.00	200,753,041,397.00	209.65
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak									
Dana Alokasi Umum									
Dana Alokasi Khusus									
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERA	53,878,689,702.00	49,847,927,014.00	92.52	158,374,778,203.00	149,508,996,026.00	94.40	97,888,480,000.00	109,043,853,000.00	111.40
Pendapatan Hibah	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00	50.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	100.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	100.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya									
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus									
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya									
Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan yg berlaku	47,878,689,702.00	46,847,927,014.00	97.85	152,374,778,203.00	143,508,996,026.00	#REF!	91,888,480,000.00	103,043,853,000.00	112.14

URAIAN	TAHUN 2020			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2,335,585,700,403.59	2,435,396,958,079.43	104.27	2,370,329,902,184.08	2,405,649,158,355.28	101.49
PENDAPATAN ASLI DAERAH	323,260,574,753.59	402,347,144,361.43	1.24	357,367,538,593.08	368,272,236,478.28	103.05
Pendapatan Pajak Daerah	88,074,800,000.00	110,299,917,866.92	125.23	88,274,600,000.00	103,347,186,431.26	117.07
Hasil Retribusi Daerah	25,238,562,856.00	26,520,448,228.21	105.08	27,504,207,085.00	28,918,690,855.97	105.14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,741,455,562.00	3,741,455,562.80	100.00	3,559,113,320.94	3,591,715,820.94	100.92
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	206,205,756,335.59	261,785,322,703.50	126.95	238,029,618,187.14	232,414,643,370.11	97.64
DANA PERIMBANGAN	1,435,075,828,974.00	1,441,047,387,801.00	100.42	1,577,411,729,591.00	1,556,827,334,981.00	98.70
PENDAPATAN TRANSFER						
Tranfer Pemerintah pusat						
Tranfer Pemerintah Daerah						
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	81,837,395,614.00	91,794,925,681.00	112.17	72,907,178,591.00	90,348,977,475.00	123.92
Dana Alokasi Umum	1,005,432,269,000.00	998,778,363,000.00	99.34	1,102,764,455,000.00	1,105,447,597,000.00	100.24
Dana Alokasi Khusus	347,806,164,360.00	350,474,099,120.00	100.77	401,740,096,000.00	361,030,760,506.00	89.87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERA	577,249,296,676.00	592,002,425,917.00	1.03	435,550,634,000.00	480,549,586,896.00	110.33
Pendapatan Hibah	108,957,100,000.00	108,283,180,000.00				
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	110,692,787,676.00	126,179,042,567.00	99.38	119,294,074,000.00	165,027,072,496.00	138.34
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	351,110,500,000.00	351,110,500,000.00	100.00	309,489,651,000.00	308,812,605,400.00	99.78
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6,488,909,000.00	6,429,703,350.00		6,766,909,000.00	6,709,909,000.00	99.16
Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan yg berlaku						

Capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yaitu :

- Prosentase PAD terhadap Pendapatan.
- Prosentase Kenaikan PAD

Hasil Analisis pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat di Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2018 - 2023					REALISASI CAPAIAN					TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2024-2026			PROYEKSI REALISASI TAHUN 2024	CATATAN ANALISA
		Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun -3 2021	Tahun -4 2022	Tahun -5 2023	Tahun -1 2019	Tahun -2 2020	Tahun -3 2021	Tahun -4 2022	Tahun -5 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	14.71	14.80	16.60	16.70	16.75	14.66	16.52	18.34	17.82	15.18	20.00	20,25	20,50	20.00	Tahun 2023 capaian kinerja tujuan tercapai 90,62 %
2	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	5.00	5.20	8.00	8.25	8.50	1.85	9.25	11.01	(0.24)	(9.81)	18.00	8.00	8.50	18.00	Tahun 2023 capaian kinerja sasran tercapai (115) % atau tidak tercapai karena lain lain PAD yang syah untuk dana blud realisasi turun dari tahun 2022, juga karena adanya klinik klinik ditiap kecamatan

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

- Tujuan

  berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten NganjukTahun 2018-2023 yaitu Tujuannya Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Daerah", dengan indikator Prosentase PAD terhadap Pendapatan capaian kinerja tercapai 89,41% dengan perhitungan sebagai berikut :

  - Realisasi PAD tahun 2023 Rp 402.455.177.760,60
  - Realisasi Pendapatan Tahun 2023 Rp 2.687.294.591.282,60

- Prosentase PAD terhadap Pendapatan 14,98%
- Target tahun 2023 16,75%
- CapaianKinerja 89,41%

➢ Sasaran

Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Prosentase peningkatan PAD yang rumusan perhitungannya adalah Realisasi PAD Tahun berjalan dikurangi realisasi PAD Tahun lalu dibanding Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100%.

Perhitungan sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

URAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2022			% KENAIKAN PAD	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	KENAIKAN/PENURUNAN	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	372,424,742,693.00	402,455,177,760.60	108.06	384,183,486,327.00	445,923,933,540.94	116.07	(43,468,755,780.34)	(9.75)
Pendapatan Pajak Daerah	136,875,250,000.00	149,424,800,824.00	109.17	122,305,000,000.00	135,071,942,647.00	110.44	14,352,858,177.00	10.63
Hasil Retribusi Daerah	29,260,340,224.00	29,386,629,455.58	100.43161	27,301,537,582.00	26,492,593,548.82	97.04	2,894,035,906.76	10.92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,425,444,869.00	4,425,444,868.86	99.999999997	4,099,258,628.00	4,099,258,627.94	100.00	326,186,240.92	7.96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201,863,707,600.00	219,218,302,612.16	108.60	230,477,690,117.00	280,260,138,717.18	121.60	(61,041,836,105.02)	(21.78)

dari tabel tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

Target kinerja tahun 2023 sebesar 8,50%, Realisasi (9,75) % sehingga Capaian kinerja tahun 2023 (114.68)% dengan perhitungan sebagai berikut :

- Relisasi PAD Tahun 2023 Rp 402.455.177.760,60
- Realisasi PAD Tahun 2022 Rp 445.923.933.540,94
- Selisih Rp (43.468.755.780,34)
- Prosentase kenaikan PAD (9,75)%
- Target Tahun 2023 8,50 %
- Capaiankenaikan PAD (114,68) %

Tidak tercapainya target kinerja sasaran dikarenakan lain-lain PAD yang sah penerimaan Blud yang turun, adanya klinik- klinik di tiap kecamatan yang berpengaruh terhadap berkurangnya masyarakat yang periksa di RSD, akan tetapi untuk realisasi Pajak Daerah yang ditangani Badan Pendapatan Daerah naik sebesar 10,63% atau Rp 14.352.858.177,00 dengan perhitungan realisasi pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp 149.424.800.824 sedang Tahun 2022 sebesar Rp 135.071.942.647,00 Kenaikan pajak daerah ini dikarenakan :

1. adanya pemasangan alat perekam pajak online dan kunjungan maintance/monitoring secara berkala,
2. adanya tempat pembayaran selain Bank Jatim yaitu Bank Mandiri, BNI dan Kantor Pos,
3. meningkatnya kesadaran beberapa Wajib Pungut Hotel yang menyetor Pajak sesuai Omzetnya

4. adanya reward kepada Wajib Pungut Hotel Restoran yang membayar sesuai omzet dan tepat waktu.
5. Sosialisasi terkait pengelolaan Pajak dan retribusi baik secara langsung, pemasangan banner dan media sosial
6. adanya Pengawasan terhadap Wajip Pajak Minerba
7. adanya pendataan prona/ptsl, Pabrik Baru, perumahan yang telah ditetapkan SPPT
8. optimalisasi pelayanan BPHTB yang telah menggunakan Sistem E BPHTB secara online sehingga memudahkan proses BPHTB mulai dari Pendaftaran sampai dengan penetapan pajaknya.
9. adanya papan Reklame yang telah dipasang sebagaian sudah disewa oleh pihak ketiga dan juga karena adanya pemasangan papan reklame baru.
10. Pembayaran Pajak dan Retribusi secara Non Tunai.

Guna mendukung tercapainyanya tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah didukung dengan pendanaan dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/SubKegiatan (Output)	KINERJA					ANGGARAN	REALISASI	%
		TARGET		REALISASI		%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	90	%	90	%	100	12,941,364,719	11,611,056,270	89.72
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang selesai	12	Dok	17	Dok	142	30,000,000	29,553,250	98.51
SubKeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6	Dok	10	Dok	166.67	10,000,000	9,791,750	97.92
SubKeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	6	Dok	7	Dok	116.67	20,000,000	19,761,500	98.81
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan yang selesai	30	Dok	40	Dok	133	9,931,514,773	8,956,583,364	90.18
SubKeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang	45	Orang	100.00	9,876,344,523	8,901,921,364	90.13
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	100.00	5,170,250	5,096,000	98.56
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester	29	Laporan	37	Laporan	127.59	50,000,000	49,566,000	99.13
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1	Dok	1	Dok		10,000,000	8,878,000	88.78
SubKeg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Dok	1	Dok	100.00	10,000,000	8,878,000	88.78
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Dok	12	Dok	100	232,390,340	214,516,000	92.31
SubKeg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48	Paket	48	Paket	100	65,790,340	50,750,400	77.14

SubKeg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dok	12	Dok	100	5,000,000	4,731,500	94.63
SubKeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	55	Orang	63	Orang	115	161,600,000	159,034,100	98.41
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi umum yang dilaksanakan	8		8		100	1,020,601,650	902,158,152	88.39
SubKeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	Paket	13	Paket	130	8,000,000	7,910,000	98.88
SubKeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10	Buah	10	Buah	100	4,995,500	4,990,250	99.89
SubKeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang tersedia	60	Paket	55	Paket	92	117,974,550	117,678,066	99.75
SubKeg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	paket	12	paket	100	46,717,600	46,711,000	99.99
SubKeg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1,120	Dok	1,110	Dok	99	4,200,000	3,520,000	83.81
SubKeg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas tamu yang terdia	12	Laporan	12	Laporan	100	9,341,000	9,045,130	96.83
SubKeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12	Laporan	12	Laporan	100	768,293,000	651,338,706	84.78
SubKeg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis	12	Dok	12	Dok	100	61,080,000	60,965,000	99.81
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang diadakan	34	Unit	34	Unit	100	624,247,306	476,502,600	76.33
SubKeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	34	Unit	34	Unit	100	624,247,306	476,502,600	76.33
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang yang dilaksanakan	3	jasa	3	Kasa	100	678,776,250	620,658,674	91.44
SubKeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100	5,500,000	4,383,860	79.71
SubKeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	12	Laporan	12	Laporan	100	205,000,000	192,172,827	93.74
SubKeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	12	Laporan	12	Laporan	100	468,276,250	424,101,987	90.57
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan yang dipelihara	76	Unit	84	Unit	111	413,834,400	402,206,230	97.19
SubKeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	19	Unit	19	Unit	100	210,274,900	200,044,390	95.13
SubKeg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	17	Unit	17	Unit	100	3,959,500	3,940,500	99.52
SubKeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	39	Unit	47	Unit	121	109,600,000	108,385,000	98.89

SubKeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100	90,000,000	89,836,340	99.82
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase kenaikan PAD	8.50	%	(9.81)	%	(112,0)	4,148,681,370	3,711,602,893	89.46
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Prosentase kenaikan PAD	8.50	%	(9.81)	%	(112)	4,148,681,370.00	3,711,602,893.00	89.46
SubKeg. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Objek Pajak Baru	3	Dok	3	Dok	100	25,900,000.00	22,720,850.00	87.73
SubKeg. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisa Pajak dan Retribusi Daerah	1	Dok	3	Dok	300	522,800,000.00	506,394,475.00	96.86
SubKeg. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan	2	Laporan	4	Laporan	200	115,900,000.00	108,407,000.00	93.53
SubKeg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25	Jenis	26	Jenis	104	432,580,000.00	400,917,550.00	92.68
SubKeg. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12	Laporan	12	Laporan	100	300,000,000.00	256,469,910.00	85.49
SubKeg. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2	Laporan	2	Laporan	100	346,202,750.00	294,767,600.00	85.14
SubKeg. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	6,250	OP	5,873	OP	93.97	32,640,000.00	28,416,050.00	87.06
SubKeg. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24	Dok	24	Dok	100	138,960,000.00	87,104,050.00	62.68
SubKeg. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	35,000	Layanan	34,955	Layanan	100	102,280,000.00	98,273,883.00	96.08
SubKeg. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Capaian Penerimaan Pajak Daerah	12	Rupiah	12	Rupiah	100	1,286,309,970.00	1,155,637,400.00	89.84
SubKeg. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah	12	Dok	12	Dok	100	513,965,000.00	474,714,000.00	92.36
SubKeg. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	9	Dok	9	Dok	100	10,740,000.00	9,331,825.00	86.89
SubKeg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dok	12	Dok	100	120,157,000.00	87,314,500.00	72.67
SubKeg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi daerah	3	Laporan	3	Laporan	100	12,290,000.00	11,596,300.00	94.36
SubKeg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4	Laporan	4	Laporan	100	187,956,650.00	169,537,500.00	90.20
jumlah total realisas							17,090,046,089.00	15,322,659,163.00	89.66

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator capaian Program Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) target 90% realisasi 90% sehingga capaian kinerja 100%. Dan penyerapan Anggaran sebesar Rp15.322.659.163,00 atau 89,66% dari anggaran Rp17.090.046.089,00.

   Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Indikator Kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan target kinerja 13 dokumen realisasi 18 Dokumen sehingga capaian kinerja 138,47%. Target dan realisasi capaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	RKA	2 Dokumen	2 Dokumen	100
3	DPA	2 Dokumen	4 Dokumen	200
4	Manajemen Resiko 2024	0 Dokumen	1 Dokumen	
5	Renstra 2024 - 2026	0 Dokumen	1 Dokumen	
6	LKJiP	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7	LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8	LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
9	Evaluasi tribulan	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33
10	Evaluasi Internal	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah	13 Dokumen	18 Dokumen	138,47

   Sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp29.553.250 atau 98,51% dari target sebesar Rp30.000.000,-. Kegiatan ini terdiri dari :

   1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator Jumlah Dokumen yang disusun dengan target 6 dokumen realisasi 10 dokumen capaian kinerja 166,67% yaitu

   - Renja Perubahan Tahun 2023,
   - Renstra 2024 – 2026,
   - Renja Tahun 2024,

- DPA TA 2023,
- DPPA (3 dokumen) ,
- RKA P Tahun Anggaran 2023,
- Maturitas Resiko 2024

Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 9.791.750 atau 97,92% dari target anggaran sebesar Rp10.000.000, sisa Rp 208.250 hal ini karena efisiensi anggaran.

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator jumlah dokumen yang disusun dengan target 7 dokumen realisasi 7 dokumen capaian 114,29 % terdiri dari :

- LKJiP 1 dokumen
- LPPD 1 dokumen
- LKPJ 1 dokumen
- Laporan Evaluasi tribulan 4 dokumen
- Laporan evaluasi Internal 1 Dokumen

dan realisasi anggaran Rp 19.761.500 atau 98,81% dari target anggaran sebesar Rp20.000.000,00.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Keuangan yang selesai dengan target 30 dokumen yaitu Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan bulanan Pengeluaran dan penerimaan, Laporan semesteran, dengan realisasi 40 dokumen, sehingga capaian kinerja tercapai 133%, sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp 8.956.583.364,- atau 90,18% dari target anggaran sebesar Rp 9.931.514.773,- kegiatan ini terdiri dari :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Jumlah Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 45 orang dengan capaian 100%, realisasi anggaran sebesar Rp 8.901.921.364 atau 90,13% dari target anggaran sebesar Rp 9.876.344.523,- hal ini dikarenakan untuk Insentif WKDH, Gaji dan tunjangan untuk PPPK tidak dicairkan dan juga adanya mutasi ASN.

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Indikator Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan Keuangan SKPD Tahun 2023 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp5.096.000,- atau 98,56% dari target anggaran sebesar Rp5.170.250,-

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Indikator jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dengan target 29 Laporan realisasi 37 Laporan dengan capaian 127,59% yang terdiri :

- Laporan Fungsional, adminstratif penerimaan dan pengeluaran 24 dokumen
- Laporan semesteran 1 dokumen
- Laporan fisik dan anggaran 12 dokumen

realisasi anggaran Rp49.566.000,00 dari target anggaran sebesar Rp50.000.000,- sehingga mencapai 99,13%.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Indikator Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target kinerja 1 dokumen yaitu buku Inventaris barang dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp8.878.000,- atau 88,78% dari target anggaran sebesar Rp10.000.000,- kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 12 Dokumen, realiasi 12 Dok sehingga capaian 100%, realisasi anggaran sebesar Rp214.516.000,- atau 92,31% dari target anggaran sebesar Rp232.390.340, kegiatan ini terdiri dari:

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Indikator jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan target kinerja 112 paket, realisasi 100 paket sehingga capaian kinerja 90 % yaitu pakaian dinas beserta kelengkapannya sejumlah 44 paket dan pakaian batik 56 paket dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp50.750.400,- atau 77,14% dari target anggaran sebesar Rp 65.790.340,- , hal ini harga satuan dalam dokumen anggaran lebih tinggi dari harga pada waktu pembelian.

1.4.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian dengan target kinerja 12 Dokumen, realisasi 12 Dokumen sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp4.731.500,- atau 94,63% dari target anggaran Rp5.000.000,-

1.4.3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Indikator Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 63 Orang, realisasi 63 Orang sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp159.034.100,- atau 98,41% dari target anggaran Rp161.600.000,-

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator jumlah Laporan administrasi umum dengan target kinerja 8 laporan, realisasi 8 laporan sehingga capaian 100%, realisasi anggaran sebesar Rp902.158.152,- atau 88,39% dari target anggaran sebesar Rp1.020.601.650, kegiatan ini terdiri dari :

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Indikator jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja 10 paket yang 3 paket merupakan belanja modal, realisasi 10 paket sehingga capaian kinerja 100% yang 3 paket (63 buah) lampu ada pada belanja modal direklas ke belanja barang dan jasa dengan nilai sebesar Rp4.740.000,- sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp7.910.000,- atau 98,88% dari target anggaran sebesar Rp8.000.000,-

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, Indikator Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia dengan target kinerja 10 paket, realisasi 10 paket, sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp4.990.250,- atau 99,89% dari target anggaran sebesar Rp4.995.500,-

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Indikator jumlah logistik kantor yang tersedia, dengan target 60 paket, realisasi 60 paket, sehingga capaian kinerja 100 % dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp117.678.066,- atau 99,75% dari target anggaran sebesar Rp117.974.550,-

1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dengan target kinerja 12 paket, realisasi 12 paket sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp46.711.000,- atau 99,99% dari target anggaran sebesar Rp46.717.600,-

1.5.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator jumlah bahan bacaan yang tersedia dengan target kinerja 1.120 Dokumen, realisasi 1.110 Dokumen, sehingga capaian kinerja 99 % dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp3.520.000 atau 83,81% dari target anggaran sebesar Rp4.200.000,-

1.5.6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Indikator jumlah laporan fasilitas tamu dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100 % dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp9.045.130,- atau 96,83% dari target anggaran sebesar Rp9.341.000,-

1.5.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100 % dan untuk realisasi anggaran Rp651.338.706,- atau 84,78% dari target anggaran sebesar Rp768.293.000,-

1.5.8 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Indikator jumlah penatausahaan arsip dinamis dengan target kinerja 12 dokumen terealisasi 12 dokumen sehingga capaian kinerja 100 % dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp60.965.000,- atau 99,81% dari target anggaran sebesar Rp61.080.000,-

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dengan target kinerja 34 unit terealisasi 34 unit sehingga capaian kinerja 100% dan untuk anggaran sebesar Rp476.502.600,- atau 76.33% dari target anggaran sebesar Rp624.247.306,- kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Jumlah Unit pengadaan peralatan dan mesin kantor dengan anggaran sebesar Rp 24.247.306,- terealisasi Rp476.502.600,- atau 76,33% dan rincian pengadaan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jml. Brg	
1	Laser Ace	4	Unit
2	Mesin Fotocopy Folio	2	Unit
3	Televisi	1	Unit
4	A.C. Split	2	Buah
5	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Buah
6	P.C Unit	1	Buah
7	P.C Unit	5	Unit
8	Note Book	1	Unit
9	Note Book	2	Unit
10	P.C Unit	1	Unit
11	Tablet PC	1	Unit
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Buah
13	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
14	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER .LCD MONITOR	2	Unit
15	Server	1	Buah
16	Router	2	Unit
	JUMLAH	34	Unit

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dari target kinerja 3 Jasa yaitu Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 620.658.674,00 atau 91,44% dari target anggaran sebesar Rp6 78.776.250, kegiatan ini terdiri dari:

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100 %, digunakan untuk pembelian materai, biaya kirim surat tercatat, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 4.383.860,- atau 79,71% dari target anggaran sebesar Rp 5.500.000,-

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator jumlah jasa komunikasi dan listrik dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100 %, hal ini digunakan untuk pembayaran listrik, Air, Telepon dan Air, sedangkan

untuk realisasi anggaran sebesar Rp192.172.827,- atau 93.74% dari target anggaran sebesar Rp205.000.000,-

1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator jumlah jasa pelayanan umum kantor dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100 %, hal ini digunakan untuk pembayaran Honorarium PPK, Bendahara, Tenaga harian lepas, jasa tenaga kebesihan, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 424.101.987,- atau 90,57% dari target anggaran sebesar Rp 468.276.250,-

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara dengan target kinerja 76 Unit realisasi 84 Unit sehingga capaian kinerja 111% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 402.206.230 atau 97,19% dari target anggaran sebesar Rp 413.834.400, kegiatan ini terdiri dari :

1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya, terealisasi 100% dari target kinerja 19 unit kendaraan dinas. Pemeliharaan kendaraan dinas ini diantaranya untuk pembelian BBM, Hergetasi, jasa kalibrasi (KIR) dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 200.044.390 atau 95,13% dari target anggaran sebesar Rp210.274.900.

1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, indikator jumlah mebel yang dipelihara dengan target kinerja 10 unit terealisasi 10 unit sehingga capaian kinerja 100% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp3.940.500 atau 99,52% dari target anggaran sebesar Rp3.959.500.

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 25 Unit terealisasi 27 Unit sehingga capaian kinerja 108% diantara untuk pemeliharaan computer, Printer, AC, Mesin Foto copy, latop, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp108.385.000 atau 98,89% dari target anggaran sebesar Rp109.600.000.

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi terealisasi 100% dari target kinerja 1 gedung kantor Bapenda Kabupaten Nganjuk dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp89.836.340 atau 99,82% dari target anggaran sebesar Rp90.000.000.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator capaian Program Hasil Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi (9,81%) dari target 8,50%, Sehingga Capaian Kinerja (115,41%) dan untuk realisasi Anggaran sebesar Rp3.711.602.893,00 atau 89,46% dari target anggaran Rp4.148.681.370,00 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator jumlah Objek Pajak Baru terealisasi 3 dokumen atau 100% dari target kinerja 3 dokumen yaitu Dokumen Target Perubahan Pendapatan tahun 2023, Target Pendapatan untuk Renstra 2024 s/d 2026, Target Pendapatan tahun 2024 dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp22.720.850,00 atau 87,73% dari target anggaran sebesar Rp25.900.000,00

2.2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen hasil analisa Pajak dan Retribusi Daerah target kinerja 2 Dokumen terealisasi 2 Dokumen atau 100% yaitu Dokumen Perda Pajak dan retribusi Daerah, draf Perbub Pajak daerah dan Retribusi daerah, seangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 506.394.475,00 atau 96,86% dari target anggaran sebesar Rp 522.800.000,00

2.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator jumlah penyuluhan kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja 2 laporan terealisasi 4 laporan atau 200% . Penyuluhan yang telah dilaksanakan berupa langsung, media sosial dan banner, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 108.407.000,00 atau 93,53% dari target anggaran sebesar Rp115.900.000,00

2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terealisasi 26 jenis dari target kinerja 25 jenis sarana sehingga capaian kinerja 104% seperti Buku bantu blok, Logo DHKP, sampul DHKP,SPPT, Spop dan L SPOP, SPTPD Reklame, restoran, Parkir, Minerba, Hiburan, kupon Undian dan

untuk realisasi anggaran sebesar Rp400.917.550 atau 92,68% dari target anggaran sebesar Rp432.580.000

2.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah terealisasi 12 laporan atau 100% dari target kinerja 12 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp256.469.910 atau 85,49% dari target anggaran sebesar Rp300.000.000

2.6 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah terealisasi 2 laporan dari target 2 laporan sehingga caian kinerja 100 % dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp294.767.600 atau 85,14% dari target anggaran sebesar Rp346.202.750.

2.7 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Indikator jumlah penilaian PBB-P2 dan BPHTB terealisasi 5.873 OP atau 93,97% dari target kinerja 6.250 OP dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp28.416.050 atau 87,06% dari target anggaran sebesar Rp32.640.000 dikarenakan dalam proses pelayanan PBB –P2 dan BHPTB sudah secara online dan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan sehingga dalam proses penilaian PBB-P2 dan BPHTB dilakukan melalui Sistem yaitu E SPPT dan E BPHTB yang mengakibatkan penilaian yang ke lapangan sudah sangat berkurang.

2.8 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah terealisasi 24 dokumen atau 100 % dari target 24 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp87.104.050 atau 62,68% dari target anggaran sebesar Rp138.960.000, dikarenakan kegiatan untuk penyerahan SPPT secara simbolis tidak jadi dilaksanakan sehubungan dengan banyaknya desa yang minta segera didistribusikannya SPPT PBB-P2 ke Desa.

2.9 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dan konsultasi terealisasi 34.955 Layanan atau 100% dari target kinerja 35.000 Layanan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp98.273.883 atau 96,08% dari target anggaran sebesar Rp102.280.000.

2.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Indikator jumlah capaian Penerimaan Pajak Daerah terealisasi 100% dari target kinerja 12

laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp1.155.637.400 atau 89,84% dari target anggaran sebesar Rp1.286.309.970.

2.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah terealisasi 12 dokumen atau 100 % dari target 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp474.714.000 atau 92,36% dari target anggaran sebesar Rp513.965.000.

2.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang selesai terealisasi 9 dokumen atau 100% dari target kinerja 9 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp9.331.825 atau 89,89% dari target anggaran sebesar Rp10.740.000, dikarenakan pengajuan pengurangan pajak daerah berkurang sehingga juga tidak melakukan pengecekan lapangan yang menyebabkan realisasi perjalanan dinas dalam kota tidak maksimal.

2.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi 12 dokumen atau 100% dari target kinerja 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp87.314.500 atau 72,67% dari target anggaran sebesar Rp120.157.000

2.14 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Indikator Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi daerah terealisasi 3 Laporan atau 100% dari target kinerja 3 Laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp11.596.300 atau 94,36% dari target anggaran sebesar Rp12.290.000

2.15 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi 4 laporan atau 100% dari target kinerja 4 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 169.537.500 atau 90,20% dari target anggaran sebesar Rp187.956.650

2.3.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD (sesuai perda SOTK)

Isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pendapatan asli Daerah
2. Masih banyaknya potensi PAD yang belum terdata

.

3. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Madiun.

   Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat maupun petugas pemungut yang diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan kabupaten madiun.
4. Perbaikan sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD. Perbaikan sistem dan prosedur tata kerja pemungutan PAD yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan penyetoran PAD bagi petugas pemungut.
5. Adanya Opsen PKB, BBNKB
6. Penyiapan Sumber Daya Manusia Pemungut PAD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
7. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan pendapatan daerah.
8. Penyiapan penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan regulasi
9. Sinergitas program kegiatan OPD guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.
10. Pelaksanaan Evaluasi Perda PDRB
11. Pengenaan PBJT atas jasa perhotelan untuk rumah dinas

2.3.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Badan pendapatan daerah

Bedasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pearangkat daerah kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis usrusan pemerintahan dibidang Pendapatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk difokuskan pada pelayanan pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.3.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadai dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- Terbatasnya & Kurangnya Tenaga SDM yang Berkualifikasi Tertentu,
- Belum sempurnanya data base pajak daerah.
- Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah.
- Masih rendahnya kejujuran wajib pajak dalam menyampaikan data obyek pajak.
- Masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum terdata.
- Belum Optimalnya kesadaran masyarakat/Wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan kanal pembayaran digital.
- Masih adanya piutang pajak
- Tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan mudah.
- Adanya pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan setoran pajak
- Opsen PKB dan BBNKB diterapkan menunggu Perda PDRB Propinsi
- Pemda belum mempunyai data awal Wajib Pajak opsen PKB dan BBNKB
- Perjanjian Kerja sama (PKS) sesuai dengan rancangan Perda PDRB belum ada
- Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan dan pengendalian yang kuat

2.3.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati nganjuk serta Program Nasional/Internasional yang mencakup Standar Pelayanan Minimal dam tujuan pembangungan berkelanjutan (SDG'S)

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2025, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu ***"Nganjuk***

yang maju, adil dan sejahtera" Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya;
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai;
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari,

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai garda depan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke 4 (empat) Kabupaten Nganjuk yaitu "4. "Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;".

2.3.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk terdapat tantangan dan peluang.

- Tantangan yang dihadapi antara lain:
    1. Penyediaan Sumber Daya Manusia pemungut PAD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
    2. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan Pajak dan retribusi daerah
    3. Penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku
    4. Sinergitas program kegiatan perangkat daerah guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.

- PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Peluang yang dihadapi dalam pada tahun 2025, pengembangan untuk pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan.
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil
3. Evaluasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
4. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Madiun.
5. Perbaikan system, prosedur dan tata kerja pemungutan pendapatan asli daerah.
6. Adanya Obsen PKB dan BBNKB yang menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak daerah

2.3.3.5 Isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024 -2026 isu- isu penting dan strategis untuk mengatasi permasalahan pada tahun 2025 antara lain :

1. Belum Optimalnya Pendapatan asli daerah
2. Penyediaan SDM Pemungut PAD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
3. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah
4. Penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi
5. Sinergitas program kegiatan OPD guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.

6. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD Penghasil untuk meningkatkan PAD.
7. Perbaikan system, prosedur dan tata kerja pemungutan pendapatan asli daerah.
8. Pelaksanaan Obsen PKB dan BBNKB yang menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak daerah
9. Dilaksanakan penggalian potensi PAD baru tanpa mengesampingkan regulasi yang sudah ada serta Optimalisasi potensi PAD yang sudah ada
10. Penyuluhan dan penyerbarluasan kebijakan Pajak untuk memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi /Wajib Pungut
11. Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi /Wajib Pungut dalam kepatuhan pembayaran pajak.
12. Pengembangan Sim Pengelolaan Pajak untuk lebih mengoptimalkan data base pajak, pelayanan Online , pelaporan pajak
13. Validasi piutang , penagihan piutang pajak
14. Meningkatkan kejujuran dan kesadaran wajib pajak & retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

2.3.3.7 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**/PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**KEBUTUHAN DANA**	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Bapenda**				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Bapenda**				
	KEUANGAN					**KEUANGAN**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**90%**	**17,390,830,489**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**90%**	**17.288.798.882**	
			Nilai sakip	**A**				**Nilai sakip**	**A**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**13 dokumen**	**40,500,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**13 dokumen**	**40.422.000**	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	20,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	20.475.000	

07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Evaluasi perangkat daerah	7 dokumen	20,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Evaluasi perangkat daerah	7 dokumen	19.947.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Keuangan yang selesai**	**42 Dokumen**	**14,964,630,489**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Keuangan yang selesai**	**42 Dokumen**	**14.046.963.600**	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	14,906,130,489	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	13.988.600.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.464.600	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	49.899.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang disusun**	**1 laporan**	**25,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang disusun**	**1 laporan**	**25,000,000**	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 laporan	25,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 laporan	25,000,000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**175,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**8 dokumen**	**274.999.750**	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	5,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	4.999.800	
09	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 Orang	170,000,000	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 Orang	269.999.950	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan**	**12 Paket**	**600,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan**	**12 Paket**	**598.962.802**	
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	160,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	159.998.700	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	80,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	79.999.602	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	118.096 lembar	60,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	118.096 lembar	59.999.800	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	4.200.000	

08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10,000,000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	210,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	209.765.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	75,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	74.999.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**22 unit**	**300,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**22 unit**	**980.658.180**	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	300,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	980.658.180	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**3 jasa**	**853,200,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**3 jasa**	**927.904.200**	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	5.949.500	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	247,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	247.180.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	600,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	674.774.700	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara**	**52 unit**	**432,500,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara**	**52 unit**	**393.888.350**	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	20 unit	240,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	20 unit	240.000.850	
05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	17 unit	2,500,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	17 unit	2.497.500	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 unit	150,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 unit	111.490.000	
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	40,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	39.900.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**5,005,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**5.570.175.000**	
			Jumlah Wajib Pajak Baru	2500 WP				Jumlah Wajib Pajak Baru	2500 WP		
			Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100.00%				Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100.00%		

			Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100.00%				Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100.00%		
	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**8.50%**	**5,005,000,000**	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**8.50%**	**5.570.175.000**	
01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan pajak daerah	3 Dokumen	150,000,000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan pajak daerah	3 Dokumen	150.000.000	untuk pendataan potensi, penyusunan peta blok
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil analis Pajak Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil analis Pajak Daerah	1 Dokumen	150.000.000	
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	350,000,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	450,000,000	
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia	25 jenis	550,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia	25 jenis	550,000,000	
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	700,000,000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	500,000,000	
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	300,000,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	300,000,000	

07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	3.000 OP	150,000,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	3.000 OP	150,000,000	
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 dokumen	220,000,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 dokumen	220,000,000	
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	115,000,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	115,000,000	
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	1,300,000,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	1,400,000,000	
11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	350,000,000	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	925.575.000	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	70,000,000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	70,000,000	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	400,000,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	389.600.000	
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	200,000,000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	200,000,000	
					22,395,830,488.75					**22.858.973.882**	

2.3.3.8 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk Badan Pendapatan daerah kabupaten Nganjuk tidak ada usulan sehingga tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Nganjuk
Badan Pendapatan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 masuk dalam prioritas Nasional Nomor 7 yaitu : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Prioritas Nasional ini dilaksanakan melalui :

- reformasi : politik;
- reformasi hukum;
- reformasi tata kelola pemerintahan;
- dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.

dan Arah Kebijakan difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi :

(1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum;

(2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung;

(3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital;

(4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan

manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara;

(5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara;

(6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta;

(7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah;

(8) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional;

(9) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui :

(a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor,

(b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah,

(c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta

(d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan

(11) penguatan manajemen kinerja pembangunan

Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui

(1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien;

(2) digitalisasi pelayanan publik;

(3) pengembangan talenta digital pelayanan publik;
(4) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan
(5) perluasan akses pelayanan publik.

Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui :

(1) optimalisasi pendapatan negara,
(2) optimalisasi belanja negara, dan
(3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.

Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan. Dari sisi perpajakan, upaya yang dilakukan mencakup :

(a) ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang didukung oleh penguatan kelembagaan penerimaan negara
(b) percepatan implementasi core tax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data;
(c) pengembangan sistem perpajakan lebih sesuai dengan perubahan struktur perekonomian;
(d) optimalisasi pengumpulan pajak atas Wajib Pajak berpendapatan tinggi;
(e) peningkatan kepatuhan pajak melalui penegakan hukum dan digitalisasi;
(f) penajaman insentif pajak untuk mendorong pengembangan sektor prioritas dalam rangka transformasi ekonomi, antara lain pembebasan pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 3 tahun pertama.

Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Sedangkan untuk sasaran Pembangunan untuk peningkatan penerimaan perpajakn yaitu Rasio Perpajakan terhadap PDB (%) yang pada tahun 2023 tercapai 10,3 % dan target tahun 2025 10,70 – 11,20

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- **Tujuan**

  Tujuan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 *"Nganjuk Akuntabel".*

  Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik" sedangkan yang tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026 adalah Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan Indikator Prosentase PAD terhadap Pendapatan,

- **Sasaran**

  Sasaran yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 adalah *Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima dengan Indikator Opini BPK terhadap LKPD dan* **sasaran** Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Prosentase Kenaikan PAD

Pada tahun 2025 dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Nganjuk

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Penghitungan	Target Tahun 2025
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan	*Prosentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan*	$\frac{\text{PAD}}{\text{PENDAPATAN}} \times 100$	20,25%
Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Penghitungan	Target Tahun 2025
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	*Prosentase Kenaikan PAD*	$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun berjalan} - \text{Realisasi PAD Tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD Tahun Lalu}} \times 100$	8%

Target Pendapatan Tahun 2025 sebagaimana terlampir

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik

menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 22.858.973.882.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

   Program ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas diantaranya digunakan untuk

   - menyusun perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
   - Menyusun administrasi Keuangan daerah
   - Menyusun Administrasi Barang Milik Daerah
   - Menyusun Administrasi Kepegawaian
   - Menyusun Administrasi Umum
   - Pengadaan Barang Milik Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang
   - Pemeliharaan Barang Milik daerah

   Dengan sasaran Program :

   1. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan Pajak
   2. Meningkatnya tata kelola Bapenda

   Indikator Program :

   1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan pajak,
   2 Nilai Sakip Bapenda

   Program ini terdiri dari Kegiatan sebagai berikut

   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;

      Kegitan ini bertujuan untuk Menyusun perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Sasaran Kegiatan ini Meningkatnya pengelolaan perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja dengan Indikator output Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan hasil adalah Prosentase dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

Sub kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKAP, RTP, dan penyusunan perencanaan lainnya. Sasaran Sub kegiatan ini yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator OutputJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan hasil Persentase dokumen perencanaan yang disusun , sehingga dengan adanya subkegiatan ini setiap program terencana dan tersusun dengan baik

1.2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi dan kinerja perangkat Sasaran Subkegiatan ini Terlaksananya EvaluaI Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Output adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat dan hasil Prosentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sehingga tercipta pola kerja yang lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini digunakan untuk menyusun pembayaran gaji dan tunjangan gaji dan pelaporan keuangan baik tahunan maupun bulanan, tribulan serta semester dengan Indikator Output Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang disusun dan hasil Persentase administrasi keuangan Perangkat daerah yang tersusun. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan kegiatan diperuntukanpembayaran gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, Belanja Insentif dibagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak dan Retribusi daerah.

Sasaran Sub kegiatan ini terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator keluaran Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN dan hasil persentase dokumen gaji dan tunjangan ASN, sehingga terbayarkan gaji dan tujangan ASN tepat waktu.

2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung penyusunan laporan akhir tahun.

Sasaran Sub kegiatan ini Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan Indikator keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan hasil persentase Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun, sehingga laporan akhir tahun tepat waktu.

2.3 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Subkegiatan ini digunakan penyusunan laporan bulanan untuk pelaporan bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/trwulan/ dan semesteran

Sasaran Subkegiatan ini Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan Indikator keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan dan hasil persentase Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD tepat waktu

3. Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadministrasian Barang Milik daerah dengan Sasaran Administrasi Barang Milik daerah yang

dilaksanakan dengan indicator Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

3.1 Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Subkegiatan ini laksanakan untuk penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan Sasaran Meningkatnya pengelolaan Penatausahaan BMD SKPD indicator hasil adalah Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah sehingga Barang milik Daerah dapat terinventarisasi dengan baik.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin ASN, meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN, dan pengadministrasian Kepegawaian dengan Sasaran Tingkat disiplin ASN indicator Jumlah ASN yang hadir dan pulang tepat waktu. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

4.1 Subkegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran Meningkatnya pengolahan administrasi kepegawaian Bapenda dengan indicator Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Dengan adanya subkegiatan ini administrasi kepegawaian tertib

4.3. Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Sasarannya Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan;

Indikator keluarannya jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

Dengan adanya subkegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan indeks Penilaian ASN Bapenda dan juga tercipta pemahaman yang matang bagi para pegawai akan peraturan perundang-undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum PerangkatDaerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan

Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah.

Sasaranya adalah Meningkatnya pengelolaan pengadministrasian umum perangkat daerah.

Indikator Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan administrasi umum.

Hasilnya Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

5.1 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Digunakan untuk menyediakan alat tulis kantor, peralatan listrik peralatan kebersihan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor

Sasarannya adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Indikatornya Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sehingga memudahkan kelancaran pelayanan administrasi kantor.

5.2 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Digunakan untuk menyediakan makan minum harian ASN bahan kebersihan kantor, bahan kesehatan ASN

Sasarannya adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Indikator keluaran adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor

Dengan tersedianya bahan Logistik kantor diharapkan memperlancar pelaksanaan tugas

5.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Digunakan untuk cetak kebutuhan adminstrasi kantor, cetak banner dan penggandaan berkas –berkas surat .

Sasarannya adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator keluarnya adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.

Dengan adanya Subkegiatan ini diharapkan dpat meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat.

5.4 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Digunakan untuk berlangganan surat kabar/Koran dan menyediakan buku buku peraturan dengan sasarannya adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan, sehingga terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan umum pegawai.

5.5 Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Digunakan untuk menyediakan makan minum tamu dinas, dengan sasarannya adalah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu dan indikatornya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, sehingga dengan tersedianya kepeluan tamu dinas tercipta hubungan yang harmonis antara banyak pihak

5.6 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Digunakan untuk kebutuhan rapat, koordinasi dan konsultasi baik dalam kota maupun luar kota dan juga untuk menyediakan makan minum rapat dinas.

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Indikator keluarannya adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sehingga mampu terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam menunjang tercapainya PAD.

5.7 Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Digunakan untuk melaksanakan penataan arsip dinamis.

Sasarannya adalah Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada Bapenda, dengan Indikator keluarannya Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Bapenda.

6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan sasarannya Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah, sehingga dengan tercukupinya barang akan memperlancar pelaksanaan tugas.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

6.1 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasarannya adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indicator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan mengomptimalkan pelayan prima.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal di bidang pengadaaan jasa . Sasarannya adalah penyediaan jasa yang dilaksanakan, dengan Indikator hasil adalah Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

7.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sehingga tercipta kelancaran dan kecepatan dalam kegiatan surat menyurat.

1.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan, sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan kedinasan

7.3 Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor , dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanan kantor.

2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar

dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal. Sasaranya adalah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah, dengan Indikator adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, sehingga dapat menambah umur barang.

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

8.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
Sasarannya adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara sehingga terpenuhinya pemeliharaan,perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan / karyawati.

8.2 Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
Sasaran Subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yang dipelihara sehingga terciptanya kenyamanan gedung tempat bertugas.

8.3 Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
Sasarannya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

8.4 SubKegiatan Pemeliharaan Mebel

Sasarannya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Mebel, dengan indicator Jumlah Mebel yang Dipelihara

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasarannya Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan indicator :
   1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah dan
   2. Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola,

2. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan daerah dengan indikator Jumlah Wajib pajak baru
3. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi dengan Indikator Jumlah wajib Pajak yang membayar tepat waktu

Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Daerah.

1. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan indicator :
    1. Prosentase Realisasi Pajak Daerah dan
    2. Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola,
2. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan daerah dengan indikator Jumlah Wajib pajak baru
3. Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi dengan Indikator Jumlah wajib Pajak yang membayar tepat waktu

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Subkegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah Sasarannya adalah Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah

2.1.2 Subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,

Sasarannya Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

2.1.3 SubKegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

Sasarannya Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indicator Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

2.1.4 Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sasarannya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhikewajibannya.

2.1.5 Sukegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sasarannya adalah Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah dan juga direncanakan untuk sensus PBB secara bertahap untuk memperbarui data PBB-P2 sehingga mampu tercapainya potensi dan data pajak daerah.

2.1.6 Subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah,

Dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

2.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sasarannya adalah Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya, dengan Indikator Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

2.1.8 Subkegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sasarannya Tersedianya data Ketetapan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

2.1.9 Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sasarannya adalah Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah sehingga dapat di ukur optimalnya pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah

2.1.10 Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak

Sasarannya adalah Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi sehingga terdapat ketepatan data pelaporan Pajak

2.1.11 Subkegiatan Penagihan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

2.1.12 Subkegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

2.1.13 Subkegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sasarannya adalah Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

2.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi

Sasarannya adalah terlaksanaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sehingga Pengelolaan Retribusi daerah bisa terkendali dengan baik.

2.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sasarannya adalah Terlaksananya Upaya Mengubah Transasksi Tunai menjadi Non Tunai, dengan Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transasksi Pemerintah Daerah, sehingga transasksi pembayaran non tunai dapat di implementasikan

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Badan Pendapatan daerah Sebagaimana table berikut :

''TABEL PRINT OUT SIPD : MENU RENJA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NGANJUK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**22.858.973.882,00**							**22.395.830.489,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**22.858.973.882,00**							**22.395.830.489,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**22.858.973.882,00**							**22.395.830.489,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)*** **Pelayanan pajak derah** ***Nilai Sakip SKPD***	**85,5 %** **85,5 %** **90 Nilai** **A Nilai**			**85,25 %** **90 Nilai**	**17.288.798.882,00**						**85,5 %** **85,5 %** **90 Nilai** **A Nilai**	**17.390.830.489,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi yang selesai*	39 dok			13 dok	40.422.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun	13 dok	40.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			6 Dokumen	20.475.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	20.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan			7 Laporan	19.947.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun	7 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Keuangan yang selesai*	57 Laporan			19 Laporan	14.046.963.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Keuangan yang selesai	19 Laporan	14.964.630.489,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan			44 Orang/bulan	13.988.600.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Keuangan yang selesai	36 Orang/bulan	14.906.130.489,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	8.464.600,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Keuangan yang selesai	1 Laporan	8.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan			18 Laporan	49.899.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Keuangan yang selesai	18 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan*	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang disusun	1 Laporan	25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Tingkat kehadiran ASN*	36 Laporan			12 Laporan	274.999.750,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Laporan Tingkat kehadiran ASN	12 Laporan	175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 Dokumen			0 Dokumen	4.999.800,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Laporan Tingkat kehadiran ASN	12 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang			48 Orang	269.999.950,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Laporan Tingkat kehadiran ASN	56 Orang	170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi umum yang dilaksanakan*	36 Laporan			12 Laporan	598.962.802,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan	12 Laporan	600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	325 Paket			10 Paket	159.998.700,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan	135 Paket	160.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	180 Paket			60 Paket	79.999.602,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan	60 Paket	80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	354288 Paket			118096 Paket	59.999.800,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan	118096 Paket	60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3360 Dokumen			1120 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan	1120 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan	12 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	209.765.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan	12 Laporan	210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	74.999.700,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan	12 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan*	35 Unit			29 Unit	980.658.180,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik daerah yang diadakan	20 Unit	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit			29 Unit	980.658.180,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik daerah yang diadakan	20 Unit	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan*	3 Jasa			3 Jasa	927.904.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Jasa	853.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan			12 Laporan	5.949.500,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	12 Laporan	6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	247.180.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	12 Laporan	247.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	674.774.700,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	12 Laporan	600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*	87 Unit			52 Unit	393.888.350,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara	52 Unit	432.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit			20 Unit	240.000.850,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara	19 Unit	240.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit			17 Unit	2.497.500,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara	10 Unit	2.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit			22 Unit	111.490.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara	22 Unit	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	39.900.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara	1 Unit	40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase realisasi retribusi daerah yang dikelola*** ***Jumlah Wajib Pajak Baru*** ***Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu***	**100 %** **997600 WP** **997600 WP** **100 %** **100 %** **386500 WP** **389500 WP** **100 %**			**100 %** **386000 WP** **992700 WP**	**5.570.175.000,00**						**100 %** **997600 WP** **997600 WP** **100 %** **100 %** **386500 WP** **1500 WP** **100 %**	**5.005.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah Wajib Pajak Baru* *Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Tepat Waktu* *Prosentase Realisasi Pajak Daerah* *Prosentase Realisasi Retribusi Daerah Daerah yang dikelola*	997600 obyek/subyek pajak 100 % 100 % 389500 obyek/subyek pajak			386000 obyek/subyek pajak 992700 obyek/subyek pajak 100 % 100 %	5.570.175.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	997600 obyek/subyek pajak 100 % 100 % 1500 obyek/subyek pajak	5.005.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen			3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	3 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	0 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	36 Laporan			12 Laporan	450.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	12 Laporan	350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25 Unit			25 Unit	550.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	25 Unit	550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	36 Laporan			12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	12 Laporan	700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan			2 Laporan	300.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	2 Laporan	300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	9000 Obyek Pajak			3000 Obyek Pajak	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	3000 Obyek Pajak	150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	72 Dokumen			24 Dokumen	220.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	24 Dokumen	220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	105000 Layanan			2 Layanan	115.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	35000 Layanan	115.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	36 Dokumen			12 Dokumen	1.400.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	12 Dokumen	1.300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	36 Dokumen			12 Dokumen	925.575.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	12 Dokumen	350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	36 Dokumen			12 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	12 Dokumen	70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	36 Dokumen			12 Dokumen	389.600.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	12 Dokumen	400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan			4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Meningkatnya PAD	4 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							**22.858.973.882,00**							**22.395.830.489,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan unsur penunjang

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2025)
	Opini BPK terhadap LKPD	17.288.798.882

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah (PAD)	8%	**5.570.175.000**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024 ada kendala terkait capaian kinerja sasaran yang pada tahun 2024 ditargetkan 18% tidak akan tercapai karena Opsen PKB dan BBNKB yang masuk Pajak daerah baru dilaksanakan tahun 2025, maka untuk target sasaran tersebut perlu dirubah dalam reviu Renstra 2024 – 2026 dan terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah

persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam pemyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.